



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 4154-4162

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengentgaskan Kemiskinan Di Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo

Devi Putri Salvira<sup>1✉</sup>, Veronica Sri Astuti<sup>2</sup>, Nourma Ulva Kumala Devi<sup>3</sup>

Administrasi Publik, Universitas Panca Marga

Email: [Veronica@upm.ac.id](mailto:Veronica@upm.ac.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bagian dari strategi nasional dalam mengurangi tingkat kemiskinan, namun pelaksanaannya di daerah perlu ditelaah secara kritis. Studi ini mengeksplorasi pelaksanaan PKH di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo dengan menelaah indikator seperti perencanaan, proses evaluasi, capaian tujuan, dan ketepatan sasaran. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aparatur kecamatan, tenaga pendamping, dan keluarga penerima manfaat. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dari berbagai sumber. Temuan studi menunjukkan bahwa program ini membantu pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan layanan kesehatan, namun belum berhasil mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin. Evaluasi pelaksanaan masih bersifat formal dan tidak menyentuh aspek sosial secara menyeluruh. Permasalahan utama lainnya adalah data penerima yang belum diperbarui. Oleh karena itu, disarankan adanya integrasi data berbasis komunitas, pelatihan pendamping, serta sinergi PKH dengan program ekonomi lokal.

Kata Kunci: *Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan, Pemberdayaan Ekonomi.*

Copyright @ author

## Abstract

The Family Hope Program (PKH) serves as a vital component of Indonesia's national poverty alleviation strategy. However, its local implementation requires critical assessment. This study investigates the effectiveness of PKH implementation in Sumberasih District, Probolinggo Regency, by examining key indicators including planning, evaluation mechanisms, goal achievement, and targeting accuracy. Employing a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews with sub-district officials, PKH facilitators, and beneficiary households. To ensure data credibility, triangulation from multiple sources was utilized. The findings reveal that while the program has improved access to basic services such as education and healthcare, it has yet to significantly foster economic self-sufficiency among poor families. Program evaluations tend to be procedural and lack depth in addressing social transformation. Another key challenge is the outdated beneficiary data. Therefore, it is recommended that PKH implementation be enhanced through community-based data integration, improved facilitator training, and alignment with local economic empowerment programs.

*Keywords: Effectiveness, Family Hope Program, Poverty, Economic Empowerment.*

## PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan tantangan multidimensi yang terus mengalami dinamika di tengah kehidupan masyarakat dan membutuhkan intervensi kebijakan sebagai bentuk nyata pelaksanaan peran negara dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Walaupun tidak dapat dihapuskan sepenuhnya, kemiskinan masih menjadi realitas yang mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia, baik di wilayah urban maupun pedesaan. Untuk menanggapi situasi ini, pemerintah telah mengembangkan sejumlah kebijakan strategis yang diwujudkan dalam bentuk program bantuan sosial, baik bersifat langsung maupun tidak langsung, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Devi et al., 2025).

Upaya pengentasan kemiskinan tersebut juga sejalan dengan arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, serta didukung oleh kesepakatan *internasional* dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) yang dideklarasikan sejak tahun 2000. Berdasarkan laporan BPS dan UNICEF (2009), Indonesia berhasil memenuhi sekitar 71 persen target MDGs pada tahun 2015. Meski demikian, persoalan serius masih muncul, terutama terkait pemerataan akses terhadap layanan kesehatan dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Secara umum, data menunjukkan adanya penurunan tingkat kemiskinan secara nasional. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin menurun dari 25,22 juta orang (9,03%) pada Maret 2024 menjadi 24,06 juta orang (8,57%) pada September 2024 (Johan, 2020).

Namun demikian, ketimpangan antarwilayah masih menjadi isu yang cukup signifikan, terutama antara daerah kota dan desa. Di wilayah Jawa Timur, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 tercatat mencapai 3,983 juta jiwa atau sekitar 9,79% dari total penduduk provinsi. Kabupaten Probolinggo, yang termasuk dalam kategori kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, mencatat angka kemiskinan sebesar 16,45% pada Maret 2024, mengalami sedikit penurunan dibandingkan 17,19% pada tahun sebelumnya (BPS Kabupaten Probolinggo, 2024).

Pada skala yang lebih kecil, Kecamatan Sumberasih di Kabupaten Probolinggo, dengan 22.404 jiwa, menghadapi kompleksitas sosial ekonomi. Kemiskinan di sini masih tinggi, ditandai oleh ketergantungan pada sektor informal seperti pertanian dan perikanan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, gizi, dan infrastruktur dasar (Subdistrict & Figures, 2022). Banyak keluarga di kecamatan ini masih bergantung pada bantuan sosial, dengan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu inisiatif utama pemerintah. PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin ke pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga penerima manfaat (Saragi *et al.*, 2021).

Sejak diluncurkan pada tahun 2007, PKH telah menjangkau semakin banyak keluarga, dengan 9.841.270 keluarga tercatat menerima bantuan hingga 2019. Namun, di Kabupaten Probolinggo, implementasi PKH menghadapi beberapa hambatan. Isu seperti pungutan liar oleh oknum dan pemotongan bantuan masih dilaporkan (Widji, 2025). Selain itu, masalah validasi data penerima, keterbatasan jumlah pendamping sosial, dan kurangnya pengawasan terhadap distribusi bantuan juga menghambat efektivitas program (Kusuma, 2021).

Penelitian sebelumnya telah mengkaji PKH dari berbagai sudut pandang. Sofianto (2020) menyoroti ketidaktepatan sasaran program akibat data yang belum valid, proses *top-down*, dan kendala pemutakhiran data di tingkat desa. Darmiyanti (2022) menemukan bahwa implementasi PKH di Kabupaten Indragiri Hilir (2016-2020) sudah berjalan baik meskipun masih ada kekurangan. Sementara itu, Nadilla, *et al.*, (2022) menunjukkan peran pendamping PKH dalam mengedukasi keluarga miskin melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) untuk meminimalkan masalah *stunting*. Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengevaluasi efektivitas PKH dalam menurunkan angka kemiskinan berdasarkan indikator terukur dan menyeluruh, terutama di Kecamatan Sumberasih. Padahal, keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada implementasi kebijakan, tetapi juga pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menggunakan teori efektivitas program Campbell (dalam Mutmainah & Husaini, 2024), yang mencakup indikator keberhasilan program (perencanaan dan evaluasi) dan keberhasilan sasaran (ketepatan sasaran dan pencapaian tujuan). Fokus utama penelitian ini adalah menilai sejauh mana PKH efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sumberasih berdasarkan indikator-indikator tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan penelitian ini adalah: "Bagaimana efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kecamatan Sumberasih?" Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori Campbell guna menilai efektivitas program secara komprehensif, baik dari aspek pelaksanaan maupun dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam serta menggambarkan bagaimana efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berdampak terhadap pengentasan kemiskinan di wilayah Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini berlandaskan pada penalaran induktif dengan menekankan interpretasi terhadap pengalaman nyata dan subjektif para informan (Adlini, *et al.*, 2023). Dalam pelaksanaannya, peneliti terlibat langsung dalam lingkungan sosial tempat program dijalankan untuk memahami makna yang tersirat di balik perilaku dan aktivitas para penerima manfaat maupun pelaksana program. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan penyusunan narasi secara komprehensif dan kronologis berdasarkan data lapangan, berbeda dengan metode kuantitatif yang lebih menitikberatkan pada angka dan statistik. Fokus utama dari penelitian ini adalah menelusuri makna, hubungan sosial, serta perubahan sosial yang muncul akibat keberadaan program bantuan tersebut (Rusli, 2021).

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan relevansi pengalaman informan. Kriteria informan yang dipilih dalam penelitian ini meliputi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah terdaftar minimal dua tahun, mengalami perubahan signifikan dalam aspek ekonomi, pendidikan, atau kesehatan setelah menerima bantuan, serta bersedia menceritakan pengalamannya secara terbuka. Selain itu, pendamping sosial PKH yang aktif mendampingi di Kecamatan Sumberasih dan memiliki pengalaman lebih dari dua tahun turut menjadi subjek penting dalam penelitian ini. Aparatur desa maupun perwakilan dari Dinas Sosial juga dilibatkan sebagai informan yang dapat memberikan sudut pandang

kebijakan lokal terhadap implementasi PKH (Sugiyono, 2020).

Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui tiga metode utama, yaitu observasi partisipatif, wawancara terstruktur, dan studi dokumentasi. Dalam observasi partisipatif, peneliti turut serta dalam kegiatan sosial penerima PKH untuk memahami interaksi dan dinamika yang terjadi secara langsung. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terstruktur yang telah disiapkan sebelumnya untuk memastikan konsistensi data yang dikumpulkan. Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dengan mengkaji berbagai dokumen terkait, seperti data penerima PKH, catatan kegiatan, hingga peraturan yang relevan (Astuti, *et al.*, 2022).

Untuk menjaga validitas data, dilakukan triangulasi baik dari segi sumber maupun metode. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memverifikasi kebenaran informasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari berbagai pihak. Selain itu, validasi dilakukan pula dengan metode *member check*, yaitu mengembalikan temuan sementara kepada informan agar mereka dapat mengonfirmasi bahwa interpretasi peneliti selaras dengan kenyataan yang mereka alami (Sugiyono, 2020).

Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Tahap pertama, data yang dianggap penting diseleksi, disaring, dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu agar lebih terfokus dan mudah dipahami. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang sistematis, kadang juga dalam bentuk tabel atau visualisasi sederhana untuk menunjukkan pola hubungan antar informasi. Pada tahap akhir, peneliti menafsirkan data tersebut secara mendalam guna memperoleh kesimpulan yang mencerminkan kondisi riil di lapangan (Sujarweni, 2021). Kesimpulan ini kemudian dihubungkan dengan teori yang mendasari penelitian untuk menilai sejauh mana Program Keluarga Harapan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di Kecamatan Sumberasih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini bertujuan mengkaji tingkat keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengurangi kemiskinan di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Analisis difokuskan pada dua aspek utama dari indikator efektivitas program yang diadaptasi melalui teori Campbell J.P dalam Mutmainah & Husaini, (2024), yaitu keberhasilan program yang mencakup unsur perencanaan dan evaluasi, serta keberhasilan sasaran yang terdiri dari pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada empat

narasumber yang memiliki keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PKH, yakni seorang aparatur pemerintah desa, pendamping sosial PKH, dan dua orang penerima bantuan. Dengan menggali pandangan dari berbagai pihak, peneliti dapat melakukan triangulasi data, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih akurat dan menyeluruh mengenai dinamika program di lapangan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, aspek perencanaan program PKH di Kecamatan Sumberasih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penetapan calon penerima bantuan. Data tersebut terlebih dahulu disusun oleh Dinas Sosial kemudian diverifikasi di tingkat desa dan kecamatan. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala, terutama terkait ketidakakuratan data awal yang menyebabkan tidak semua keluarga miskin terakomodasi sebagai penerima bantuan. Salah satu pendamping sosial menyebutkan bahwa proses verifikasi faktual di lapangan kerap dilakukan secara terbatas karena minimnya tenaga lapangan dan keterbatasan waktu. Hal ini konsisten dengan temuan Sofianto (2020), yang menekankan bahwa masalah ketepatan data sering muncul akibat proses penyusunan DTKS yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai. Meski struktur perencanaan terkesan *top-down*, ada indikasi keterlibatan perangkat desa melalui forum musyawarah desa, meskipun peranannya masih belum signifikan. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan pentingnya penguatan mekanisme perencanaan berbasis partisipasi lokal agar program PKH lebih adaptif terhadap kebutuhan nyata masyarakat miskin di daerah.

Pada indikator evaluasi program, informan dari pihak kecamatan mengungkapkan bahwa pelaporan evaluatif dilakukan secara berkala melalui pendamping PKH yang menyampaikan laporan kepada Dinas Sosial kabupaten. Evaluasi ini umumnya berfokus pada aspek administratif seperti kehadiran dalam pertemuan P2K2, status pendidikan anak, serta pemanfaatan fasilitas kesehatan. Namun, aspek evaluasi belum sepenuhnya menyentuh perubahan sosial dan ekonomi yang dialami penerima manfaat. Salah satu KPM menyatakan bahwa dampak bantuan belum sepenuhnya dirasakan dalam perbaikan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan. Hal ini menandakan bahwa proses evaluasi masih berorientasi pada kepatuhan administratif, belum menyentuh dimensi transformasi sosial. Temuan ini berbeda dengan hasil studi Darmiyanti (2022) yang menyatakan bahwa evaluasi PKH di Indragiri Hilir telah mampu mencakup upaya peningkatan kapasitas keluarga melalui pelatihan keterampilan. Maka dari itu, dibutuhkan inovasi dalam sistem evaluasi berbasis hasil (*outcome-based evaluation*) yang lebih menyoroti efek jangka panjang dari program, bukan hanya kepatuhan administratif.

Dari sisi pencapaian tujuan, mayoritas responden mengakui bahwa PKH berkontribusi dalam meringankan beban biaya pendidikan dan kesehatan anak, yang merupakan tujuan utama program. Salah satu penerima bantuan mengungkapkan bahwa dengan dana bantuan tersebut, ia mampu menyekolahkan anaknya hingga tingkat menengah atas. Namun demikian, harapan akan peningkatan kemandirian ekonomi keluarga belum sepenuhnya terwujud. Program ini masih dominan pada aspek konsumtif, bukan transformatif. Studi Nadilla, *et al.*, (2022) menyoroti pentingnya peran P2K2 dalam mendorong edukasi sosial bagi keluarga penerima. Sayangnya, di Kecamatan Sumberasih, pelaksanaan P2K2 belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan intensitas pertemuan. Oleh karena itu, kebijakan program perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk memberdayakan keluarga melalui peningkatan kapasitas ekonomi.

Sedangkan dalam hal ketepatan sasaran, data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar penerima memang tergolong keluarga miskin, namun masih ditemukan kasus di mana rumah tangga non-miskin menerima bantuan. Hal ini terjadi akibat ketidakterbaruan data dan keterlambatan dalam proses verifikasi oleh otoritas terkait. Aparat desa menyampaikan bahwa pengajuan pembaruan data seringkali terkendala oleh prosedur birokrasi yang panjang, dan pendamping sosial pun kesulitan dalam menghapus penerima yang tidak lagi memenuhi syarat. Hal ini sejalan dengan temuan Sofianto (2020), yang menggarisbawahi lemahnya sistem pemutakhiran data sebagai penyebab utama ketidaktepatan sasaran. Masalah ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dan mengurangi efektivitas program secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem verifikasi data yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi digital serta partisipasi komunitas agar proses pemutakhiran berjalan lebih akurat dan *real-time*.

Secara umum, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Sumberasih berada dalam fase transisi dari bantuan karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan. Tingkat keberhasilan program masih sangat bergantung pada ketepatan identifikasi sasaran, keaktifan pendamping sosial, serta efektivitas sistem perencanaan dan evaluasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintah memperkuat pengelolaan data, meningkatkan kapasitas pendamping sosial, serta memperluas sinergi antara program bantuan dan pelatihan ekonomi produktif. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong transformasi sosial yang lebih inklusif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan.

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi kemiskinan di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, menunjukkan hasil yang positif, meskipun belum optimal pada setiap indikator utama. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perencanaan program mengacu pada data DTKS dan melibatkan tingkat desa, masalah validitas data dan keterbatasan sumber daya di lapangan masih menjadi kendala. Evaluasi program cenderung bersifat administratif dan belum mendalami aspek transformasi sosial ekonomi penerima manfaat. Program ini berhasil memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak, tetapi belum mendorong kemandirian ekonomi keluarga secara signifikan karena pendekatan yang masih konsumtif. Ketepatan sasaran juga menjadi tantangan akibat lemahnya mekanisme pembaruan data dan prosedur birokrasi yang rumit. Secara keseluruhan, keberhasilan PKH di wilayah ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi lainnya. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah informan dan cakupan wilayah yang terbatas pada satu kecamatan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke daerah lain dengan karakteristik sosial yang berbeda. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas analisis dengan mencakup lintas kecamatan dan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang sosial ekonomi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Rekomendasi konkret dari penelitian ini mencakup perlunya reformasi sistem pendataan secara digital dan partisipatif, penguatan kapasitas pendamping sosial melalui pelatihan dan penambahan tenaga lapangan, serta integrasi PKH dengan program penguatan ekonomi lokal seperti pelatihan kewirausahaan dan bantuan modal usaha. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan PKH dapat bertransformasi dari sekadar program bantuan sosial menjadi instrumen strategis yang mampu mendorong perubahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, R., Mukhlis, & Rahayu, T. (2023). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial. Yogyakarta: Deepublish.
- Astuti, N. F., Arifin, Z., & Lestari, P. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. Malang: UB Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://www.bps.go.id>
- BPS & UNICEF. (2009). *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia*.
- Darmiyanti, I. (2022). *Implementasi Program PKH di Kabupaten Jember*. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 88–101.

- Devi, N. U. K., Supriyanto, & Hariyanto, T. (2025). *Implementasi Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sumberlele*. Universitas Panca Marga.
- Johan, A. (2020). *Analisis Pencapaian MDGs di Indonesia*. Jakarta: Kementerian PPN.
- Kusuma, D. (2021, 15 November). *Kasus Dugaan Pemotongan Dana PKH di Probolinggo Terus Didalami Polisi*. [TribunProbolinggo.com](http://TribunProbolinggo.com).
- Mutmainah, N., & Husaini, H. (2024). *Evaluasi Program Sosial Berbasis Efektivitas Campbell*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 25–36.
- Nadilla, R., Suryani, I., & Fadli, M. (2022). *Peran Pendamping PKH dalam Menangani Stunting*. *Jurnal Gizi dan Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 44–56.
- Rusli. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Deskriptif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saragi, H. R., Simanjuntak, S., & Nuraini, L. (2021). *Program Keluarga Harapan dan Dampaknya terhadap Masyarakat Miskin*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 13–22.
- Sofianto, A. (2020). *Tantangan Implementasi PKH di Daerah Perdesaan*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(3), 65–78.
- Subdistrict & Figures. (2022). *Profil Kecamatan Sumberasih 2022*. BPS Kabupaten Probolinggo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2021). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Widji. (2025, 6 Februari). *Skandal Bansos PKH BPNT di Probolinggo: Keadilan Dijual, Rakyat Dipermainkan*. [Media Pojok Nasional](http://MediaPojokNasional.com).